



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	12
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 4 Februari 2020
Pukul	:	13.00 WIB – selesai
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Kepala BKKBN terhadap perubahan BKKBN (<i>rebranding</i>) terkait logo baru, pola advokasi, konseling dan sosialisasi program BKKBN kepada masyarakat;2. Penjelasan Kepala BKKBN terkait pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2020 dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah;3. Penjelasan Kepala BKKBN terkait hasil uji coba dan rencana penggunaan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai tolak ukur pembangunan keluarga yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) pilar yang dimiliki BKKBN;4. Membahas Pelaksanaan Kampung KB yang diharapkan bisa menjadi episentrum Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Ketua Rapat : - Di buka oleh : H. Ansory Siregar, Lc./ Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI
- Di lanjutkan oleh : Dra. Sri Rahayu/ Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. 35 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) : dr. Hasto Wardoyo,
Sp. OG.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dibuka pukul 13.50 WIB, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait *rebranding* terutama kepada generasi milenial agar tujuan BKKBN untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang dapat tercapai.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk memastikan kualitas Pendataan Keluarga tahun 2020 sehingga menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat data yang dihasilkan dijadikan acuan untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga (KKBP) di Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengevaluasi Program Kampung KB sehingga ada keterpaduan antara Program Kependudukan, Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga (KKBP) dengan program pembangunan sektor terkait.
4. Komisi IX DPR RI mendukung keputusan BKKBN untuk tetap melakukan pengadaan alat kontrasepsi secara sektoral guna memastikan ketersediaan, pemenuhan kebutuhan dan distribusi alat kontrasepsi bagi seluruh masyarakat.

5. Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan anggaran program BKKBN terkait keluarga berencana dan ketahanan keluarga.
6. Komisi IX DPR RI mendukung penguatan pelayanan KB di Program JKN melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 4 Februari 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

Dra. SRI RAHAYU
A-217